

Optimalisasi Barang Milik Negara *Idle* sebagai *Underlying Asset* Sukuk *Murabahah* untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Ghozi Akhyarul Ilmi¹ 

¹ Program Studi Manajemen Aset, Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jalan Bintaro Raya Sektor V, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten 15222, Indonesia

*Corresponding Author: ghoziilmi890@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 26 February 2024

Revised: 23 September 2024

Accepted: 28 September 2024

Available online: 30 September 2024

E-ISSN: 2830-6821

How to cite:

Ilmi, Ghozi Akhyarul. 2024. "Optimalisasi Barang Milik Negara *Idle* sebagai *Underlying Asset* Sukuk *Murabahah* untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 3(2): 90-97

ABSTRAK

Pengelolaan aset pemerintah hakikatnya digunakan sebagai efektivitas dari pelayanan masyarakat dan maksimasi penggunaan sumber daya. Dalam hal ini, aspek ekonomi makro yang terdekat adalah investasi yang dapat ditanamkan pada BMN pemerintah sehingga BMN pemerintah dapat bernilai ekonomis dan produktif. Apabila BMN tidak digunakan secara efisien maka yang terjadi adalah *existing asset* yang *idle* dan *underutilized* sehingga pemerintah harus memberikan *effort* lebih pada biaya yang dikeluarkan dan akan terjadi *financial burden*. *Financial burden* ini akan menyebabkan pembengkakan anggaran dari APBN. Oleh karena itu, pemerintah harus mengubah pola pikir dari yang sebelumnya mengeluarkan *expense* kemudian mengubah pengeluaran ini menjadi *investment*. Pada analisis kali ini penulis menggunakan metode *content analysis* yang merupakan teknik penelitian kualitatif yang menekankan pembahasan pada suatu informasi dan menggunakan metode *scoping review* yang menggunakan metode menganalisis literatur dari berbagai sumber secara mendalam. Kesimpulan dalam analisis ini adalah sukuk *murabahah* merupakan solusi yang ditawarkan untuk menjawab isu-isu yang telah disebut.

Kata kunci: sukuk *murabahah*, beban keuangan, *idle*, barang milik negara (BMN)

ABSTRACT

The management of government assets is essentially utilized for the effectiveness of public services and the maximization of resource utilization. In this context, the closest macroeconomic aspect is investment that can be infused into government non-financial assets (BMN), enabling them to have economic and productive value. If BMN is not used efficiently, it results in existing idle and underutilized assets, leading the government to expend additional efforts and incurring financial burdens. This financial burden, in turn, causes an inflationary effect on the state budget (APBN). Therefore, the government needs to shift its mindset from merely incurring expenses to transforming these expenditures into investments. In this analysis, the author employs the content analysis method, a qualitative research technique emphasizing the discussion of information, along with the scoping review method, which involves a comprehensive analysis of literature from various sources. The conclusion drawn from this analysis is that sukuk *murabahah* emerges as a proposed solution to address the aforementioned issues.

Keywords: sukuk *murabahah*, financial burden, *idle*, government non-financial assets



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

DOI: [10.32734/jlpsp.v3i2.15776](https://doi.org/10.32734/jlpsp.v3i2.15776)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini sedang dalam proses untuk menjadi negara yang lebih maju. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada konsumsi masyarakat dalam peningkatan PDB atau produk domestik bruto. Perumbuhan ekonomi Sebagian besar disumbang oleh konsumsi rumah tangga yaitu sekitar 55%-58% (Investment 2024). Oleh karena itu pemerintah harus mulai mengubah arah kebijakan pada aspek yang tidak berbau “*expense*” seperti layaknya konsumsi. Tetapi, pemerintah harus merubah pola *government spending* menjadi *investment* atau yang menghasilkan. Jadi, pemerintah mulai sekarang perlu melirik opsi lain yaitu Investasi untuk peningkatan PDB yang bisa menghasilkan dan tidak terus menerus melakukan ekspansi pada konsumsi masyarakat. Perlu diketahui bahwa tujuan Indonesia saat ini adalah mewujudkan Indonesia Emas 2045 (Rencana Jangka Panjang Nasional 2025-2045). Salah satu tujuan Program Indonesia Emas 2045 dari RPJPN 2025-2045 yang dibuat oleh Bappenas ini adalah pendapatan per kapita atau PDB per kapita setara dengan negara maju. Negara yang memiliki PDB tinggi bisa dianggap jadi negara yang maju (Karimah and Putri 2021). Sehingga mengindikasikan apabila Indonesia ingin mewujudkan tujuan Indonesia Emas 2045 harus meningkatkan PDB per kapita setidaknya setara dengan negara maju lainnya. Dalam teori ilmu ekonomi makro, dalam perekonomian terbuka, terdapat aspek yang berpengaruh dalam stimulus peningkatan PDB yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor impor (Mankiw 2006). Oleh karena itu, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pemerintah harus segera menggenjot investasi seperti negara-negara maju lainnya demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk berinvestasi adalah menanamkan sukuk murabahah atau sukuk yang bisa dianggap untuk ikut dalam penyertaan modal pemerintah. Dalam penerbitan sukuk harus ada *underlying asset* yang mana *underlying asset* tersebut harus berupa sektor yang menghasilkan dan asetnya berwujud sebagai penjamin nilainya. Saat ini yang menjadi permasalahan adalah banyaknya BMN *idle* sehingga realisasi penerbitan sukuk semakin kecil. Beberapa masalah yang sering timbul melibatkan ketidaksesuaian antara kebutuhan aset dan kinerja Kementerian/Lembaga dalam proses pengadaan, alokasi, dan pemanfaatan kembali aset yang sudah ada. Permasalahan lain yang umumnya muncul melibatkan sejumlah aset yang tidak aktif (*idle*), aset yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan (*underused*), dan banyaknya aset yang belum dimanfaatkan sesuai dengan potensi Highest and Best Use (*underutilize*) (Putri and Ardini 2020). Menurut Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2022), permasalahan aset negara yang saat ini dihadapi adalah banyaknya tanah dan bangunan yang tidak digunakan dengan baik dan terlantar sehingga seringkali aset negara diokupasi atau diklaim secara sepihak oleh masyarakat. Banyaknya aset idle dan non-HBU tersebut bisa menjadi *underlying asset* yang melimpah untuk penerbitan sukuk apabila dikelola dengan baik. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh aset BMN agar dapat dijadikan dasar penerbitan sukuk, yaitu memiliki nilai ekonomis, kelayakan, tercatat, dan bebas dari sengketa (Rosyidah 2015). Pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset BMN dengan menerbitkan sertifikat kepemilikan negara, yang nantinya dapat menjadi dasar yang dijamin oleh hukum. Berikut adalah perbandingan data BMN menurut LKPP Kemenkeu tahun 2017 dan 2021

Tabel 1. Nilai Aset Tetap Indonesia Tahun 2017 dan 2021

No	Jenis Aset	Tahun 2017	Tahun 2021
1	Tanah	1.037.757.720	4.541.798.614
2	Gedung dan Bangunan	275.152.781	784.676.725
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	681.081.175	420.147.571
4	Aset Tetap Lainnya	51.165.291	65.009.747

Sumber: LKPP Kementerian Keuangan 2017-2021 (2021)

Jika dilihat dari Tabel 1 maka peningkatan aset dari tahun 5 tahun terakhir 2017 ke tahun 2021 cukup signifikan yang mana sangat potensial untuk menerbitkan sukuk dengan *underlying*

asset pemerintah. Dari segala isu yang terjadi, maka perlu optimalisasi BMN sebagai penerbitan sukuk untuk menjadi stimulus aspek investasi dan menjadi salah satu alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan penelitian ini melibatkan eksplorasi mendalam dengan fokus utama untuk mengevaluasi potensi pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya sebagai instrumen investasi yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merinci sejauh mana *underutilized* BMN atau bahkan BMN yang berada dalam kondisi idle dapat dijadikan sebagai sumber daya investasi yang strategis dan efektif. Pada intinya, tujuan penelitian ini terletak pada pemahaman lebih lanjut mengenai potensi nilai tambah yang dapat dihasilkan dari optimalisasi pemanfaatan aset BMN yang hingga kini belum sepenuhnya dioptimalkan.

Penelitian ini berusaha untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah terperinci terkait dengan potensi investasi dari aset BMN yang belum termanfaatkan sepenuhnya. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap kebijakan, peraturan, dan praktik-praktik terkini yang berkaitan dengan pemanfaatan aset BMN sebagai instrumen investasi. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan dampak potensial dari optimalisasi aset BMN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, tujuan dan rumusan masalah penelitian ini berfungsi sebagai landasan bagi peneliti untuk menjelajahi dan menyajikan temuan yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam konteks pengembangan ekonomi negara.

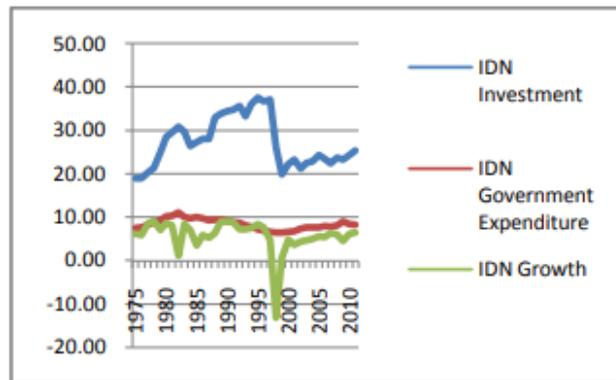
KERANGKA TEORI

Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai Tolak Ukur Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi mencakup transformasi kondisi ekonomi suatu negara dalam suatu periode tertentu, yang dapat mencakup peningkatan atau penurunan. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan aktivitas ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat (Sukirno 2006). PDB merupakan tolak ukur yang digunakan oleh negara di dunia sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. PDB merupakan parameter pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan kegiatan produksi barang dan jasa di suatu negara. Oleh karena itu, dengan memperhatikan PDB, kita dapat memahami sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi di negara tersebut (Alvionita 2021).

Investasi

Pertumbuhan ekonomi yang baik akan menunjukkan trend yang cenderung positif dan meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menjadi *multiplier effect* di bidang-bidang lainnya yang mana juga digunakan untuk pemerataan kesejahteraan dan mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial. Investasi (akumulasi modal) merupakan langkah awal yang dapat digunakan untuk *me-trigger* pertumbuhan ekonomi dari suatu negara tidak terkecuali Indonesia. Dalam investasi ini sasaran yang digaungkan adalah masyarakat, swasta dalam negeri, dan investasi asing (Mongan and Saputra 2012). Investasi terjadi ketika sebagian dari pendapatan yang diterima saat ini disimpan dan diinvestasikan kembali untuk meningkatkan hasil dan pendapatan di masa depan. Penggunaan dana tersebut dalam bentuk pembelian pabrik, mesin, peralatan, dan bahan baku baru akan meningkatkan stok modal fisik suatu negara, yang mencakup total nilai riil neto dari semua barang modal produktif secara fisik. Hal ini memungkinkan peningkatan tingkat output yang diinginkan. Investasi produktif ini didukung oleh investasi dengan apa yang dikenal sebagai infrastruktur sosial dan ekonomi, seperti jalan, listrik, air, sanitasi, komunikasi, dan sejenisnya, yang memfasilitasi serta mengintegrasikan berbagai aktivitas ekonomi (Todaro and Smith 2006).



Gambar 1. Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1975-2010 (Mongan & Saputra 2012)

Dari data yang disajikan mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia *driven by investment*. Ketika investasi Indonesia menurun maka pertumbuhan ekonomi juga menurun sangat drastis. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia pertumbuhan ekonominya *driven by investment*. Indonesia juga menempati negara nomor 3 dengan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang paling besar di ASEAN yaitu pada angka 27.32% (Mongan and Saputra 2012). Ini merupakan peluang Indonesia untuk membuka ruang investasi lebih lebar lagi karena efisiensi dan efektivitas investasi terhadap *economic growth* cukup sensitif. Dari hal tersebut maka bisa disimpulkan bahwa dengan meningkatkan investasi maka pertumbuhan ekonomi akan melesat secara signifikan dan akan meningkatkan PDB secara signifikan pula.

Sukuk

Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan yang mirip dengan dengan obligasi yaitu dengan menerbitkan surat berharga. Namun, kedua hal ini berbeda karena sukuk merupakan instrumen syariah yang berbasis syariah dan menggunakan *underlying asset* sebagai penjaminan nilai dan imbal balik tidak mengikuti rating bunga yang fluktuatif tetapi berkiblat pada bagi hasil sehingga sesuai dengan prinsip syariah (Rosyidah 2015). Di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim dapat menjadi alternatif investasi danannya untuk bisnis halal dan diperbolehkan syariat islam yang mana ini dapat menjadi *leverage* dan stimulus untuk berinvestasi pada sukuk. Sangat potensial apabila sukuk diterbitkan oleh pemerintah Indonesia karena banyak proyek dan BMN yang berpotensi sebagai *underlying asset* meskipun sekarang masih *idle* dan perlu dioptimalisasikan kedepannya.

Barang Milik Negara (BMN) sebagai Dasar Penerbitan Sukuk

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Barang Milik Negara (BMN) ini merupakan aset Negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dibatasi penggunaannya, digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian, dimana pengelolaan Barang Milik Negara ini meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Sebagai barang yang berwujud BMN bisa dijadikan *underlying asset* untuk penerbitan investasi SBSN atau sukuk. BMN harus memiliki nilai ekonomis untuk dapat diterbitkan sebagai *underlying asset* sehingga dapat digunakan untuk membayar bagi hasil dari investasi sukuk yang ditanam oleh masyarakat. Dalam konteks Indonesia, investasi sukuk ini telah diatur dalam peraturan UU No.19 tahun 2008 tentang SBSN dan PMK No. 205/PMK.08/2017 tentang pengelolaan aset SBSN yang berasal dari BMN. Meskipun sudah dicantumkan dalam UU dan telah diamankan dalam PMK realisasi sukuk penerbitan sukuk negara

masih kecil yaitu sekitar 4% dari keseluruhan total aset BMN pada tahun 2014 (Rosyidah 2015). Sehingga, diperlukan optimalisasi penggunaan BMN sebagai *underlying asset* penerbitan sukuk agar stimulus pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode studi literatur untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber literatur, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait. Pendekatan studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi gap pengetahuan, memahami evolusi konsep, dan mengevaluasi berbagai metodologi yang telah diterapkan dalam penelitian sebelumnya. Melalui proses studi literatur, penelitian ini tidak hanya membangun fondasi teoritis yang solid, tetapi juga memberikan kontribusi pada pemahaman kontemporer terhadap isu yang sedang dipelajari. Analisis mendalam terhadap literatur ilmiah memberikan wawasan yang mendalam terhadap perkembangan dan perubahan dalam pemikiran akademis terkait topik penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi baru dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap topiknya, membawa pengembangan pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi.

Dalam analisis ini penulis menggunakan metode analisis *scoping review* dan *content analysis*. Metode *scoping review* bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyajikan informasi dari berbagai sumber literatur internasional, termasuk artikel jurnal, disertasi, dan working paper, yang membahas penerapan *best practice* dalam optimalisasi BMN (Bungin 2017). Sedangkan, *content analysis* merupakan metode penelitian yang secara komprehensif mengidentifikasi literatur dengan mendalam, diperoleh dari berbagai sumber menggunakan metode penelitian beragam, dan memiliki relevansi dengan topik penelitian (Arksey and Malley 2005). Dalam penelitian ini, jenis data yang diperoleh adalah data sekunder, yang secara khusus merujuk pada data kualitatif yang dihimpun dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan menganalisis temuan serta wawasan yang telah dikumpulkan oleh peneliti-peneliti terdahulu, memberikan landasan yang kokoh untuk memahami konteks, tren, dan dinamika yang relevan dengan ruang lingkup penelitian saat ini. Dengan memanfaatkan data kualitatif yang telah ada, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap fenomena yang diteliti dan menyumbangkan perspektif baru yang dapat memberikan nilai tambah pada literatur ilmiah.

PEMBAHASAN

Sukuk *murabahah* merupakan salah satu opsi inovasi yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menggaet investasi dari masyarakat Indonesia untuk memudahkan perputaran ekonomi dan dapat meningkatkan dengan cepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sukuk *murabahah* adalah sukuk yang berasaskan pada akad *murabahah* yaitu kontrak jual beli yang mana orientasinya adalah untuk margin keuntungan (Hanapi 2019). Dalam dunia investasi Indonesia, sukuk ini digunakan untuk masyarakat yang ingin menyertakan modal pada pemerintah tetapi perlu sistematika ekonomi syariah sehingga menjaminkan investasinya pada *underlying asset* yang menjadi penyertaan modal pemerintah pada perusahaan BUMN.

Tabel 2. Posisi Surat Berharga Nasional (SBN) (dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
						Dec	Jan	Feb	Mar
SBSN	382.210	433.627	529.322	725.340	863.260	996.407	1.024.124	1.050.230	1.059.538
Menurut Jenis	382.210	433.627	529.322	725.340	863.260	996.407	1.024.124	1.050.230	1.059.538
<i>Fixed Rate</i>	292.544	349.458	450.079	629.047	755.589	851.096	874.196	898.802	919.692
SBSN Ritel	67.502	53.974	43.591	67.378	102.671	126.961	143.538	143.538	131.395
SPN Syariah	19.640	25.250	21.560	14.400	5.000	1.773	6.390	7.890	8.450
Sukuk Tabungan	2.524	4.946	14.091	14.515	0	16.577	-	-	-

Sumber: Bank Indonesia (2023)

Tabel 2 menunjukkan bahwa SBSN semakin meningkat hal ini memunculkan potensi bahwa sukuk semakin lama semakin diminati masyarakat Indonesia karena sifatnya yang fleksibel dan sesuai dengan ekonomi syariah.

Sukuk *murabahah* membutuhkan *underlying asset* seperti yang ada pada tinjauan pustaka untuk menerbitkannya kemudian akan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan dari aset atau BMN yang ditunjuk sebagai *underlying asset* sukuk tersebut. Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 3 Ayat 1, ditekankan bahwa pengelolaan BMN harus sesuai dengan peraturan yang artinya pengelolaan BMN harus dilaksanakan dengan baik. Permasalahan saat ini adalah banyaknya BMN yang (Placeholder) dan belum terutilisasi secara penuh sehingga diperlukan inovasi pengelolaan, salah satunya adalah digunakan untuk *underlying asset* penerbitan sukuk *murabahah*. Sesuai dengan amanat pada Pasal 1 UU No.19 Tahun 2008 tentang SBSN, yang menyatakan bahwa SBSN dikeluarkan dengan tanggung jawab negara untuk menyediakan *underlying asset* yang menjadi dasar SBSN yang memiliki nilai ekonomis. Aset tersebut bisa berupa tanah dan/atau bangunan, atau jenis aset lainnya, yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SBSN.

Setelah sukuk dapat diterbitkan dengan BMN maka setelah itu yang harusnya dilakukan pemerintah adalah melakukan analisis HBU untuk mengetahui potensi BMN yang dijadikan *underlying asset* tersebut. HBU mencerminkan pemanfaatan yang paling memungkinkan dan optimal dari suatu aset, yang memenuhi kriteria fisik, izin hukum lengkap, layak secara finansial, dan menghasilkan nilai tertinggi (Fitri and Triono 2020). Dari sini bisa diketahui apa potensi dari aset yang diterbitkan sukuk *murabahah* sehingga nantinya dapat diperuntukkan sesuai fungsinya untuk *generating income* dan sesuai terhadap proyek yang akan dijalankan.

Mekanisme untuk *generating income* dari sukuk ini adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menggunakannya untuk revitalisasi aset pemerintah yang *idle* dan belum terutilisasi sehingga pemerintah tidak perlu untuk mengeluarkan dana dalam melakukan revitalisasi dan tetap bisa menjaga keseimbangan dari APBN. Nantinya, BMN yang telah direvitalisasi ini akan digunakan sebagai penyertaan modal untuk BUMN. Penyertaan Modal yang diwakili oleh rasio ekuitas dan pertumbuhan aset yang diwakili oleh rasio pertumbuhan aset tidak lancar berpengaruh secara signifikan untuk kinerja keuangan dari BUMN yang diukur dari *return on equity* (Dinarjito 2019). Sehingga, PMN dari BMN yang telah direvitalisasi akan meningkatkan income dan dana bagi hasil dari perusahaan juga semakin meningkat. Hal ini sekaligus meningkatkan kinerja aset juga dapat meningkatkan kontribusi pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan PDB. Dalam jangka panjang sukuk akan berguna untuk peningkatan perekonomian Indonesia dan apabila diberi ruang penuh sukuk akan berkembang pesat. Untuk saat ini, kinerja investasi lewat instrumen keuangan surat utang didominasi oleh SUN atau surat utang negara sehingga SBSN belum berpengaruh secara signifikan terhadap PDB karena kalah pamor dengan SUN sehingga peminat atau investor dari sukuk masih sedikit (Alvionita 2021).

SIMPULAN

Indonesia mempunyai tujuan yang tertuang dalam RPJPN yaitu untuk menjadi Indonesia Emas 2045 atau dalam artian lain tujuan dari Indonesia adalah menjadi negara maju yang intinya Indonesia harus meningkatkan intervensi pada PDB. Salah satu aspek yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang mana juga akan memengaruhi PDB. Terdapat banyak *tools* yang dapat digunakan untuk investasi, salah satunya yaitu sukuk. Dalam isu yang diangkat dalam tulisan ini, penerbitan sukuk seakan-akan menjawab 3 permasalahan sekaligus yaitu *unutilized asset* BMN, *financial burden*, dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sukuk disimbolkan sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang mana dasarnya adalah *underlying asset* yang berasal dari BMN idle dan BMN yang kurang optimal. Dana investasi ini nantinya akan digunakan untuk revitalisasi aset BMN yang rusak dan kemudian dijadikan sebagai PMN untuk BMN sehingga dapat *generating income*. Dengan investasi ini juga sebenarnya dapat menjadi stimulus untuk pertumbuhan ekonomi tetapi karena kurangnya peminatan dan pengetahuan tentang sukuk maka korelasi penerbitan SBSN terhadap pertumbuhan ekonomi negatif yang artinya hanya mempunyai sedikit pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tugas pemerintah selanjutnya adalah melakukan promosi atas penerbitan SBSN dan memberikan insentif pada masyarakat yang investasi pada sukuk karena setelah analisis panjang yang dilakukan penulis investasi pada sukuk ini sangat potensial. Pemerintah juga harus mengoptimalkan BMN *idle* terutama yang dapat diperuntukkan untuk *underlying asset* sukuk *murabahah* karena *underlying asset* dari total keseluruhan aset masih berada pada kisaran 4%. Sebenarnya, banyak sekali aset Indonesia yang potensial dan dapat digunakan sebagai penerbitan sukuk lewat optimalisasi BMN dari pendanaan sukuk *murabahah*. Maka dari itu, pemerintah harus secara berkala mengoptimalkan BMN agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvionita, Monica. 2021. "Pengaruh Penerbitan Obligasi dan Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ."
- Arksey, H, and L. O. Malley. 2005. "Scoping Studies: Towards A Methodological Framework." *International Journal of Social Research* 19-32.
- Bank Indonesia. 2023. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia* . Laporan Tahunan, Jakarta: Bank Indonesia .
- Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Press.
- Dinarjito, Agung. 2019. "Penyertaan Modal Negara Pertumbuhan Aset Dan Kinerja Badan Usaha Milik Negara." *E-Jurnal Akuntansi* 1323-1345.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2021. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat* . Laporan Tahunan, Jakarta Pusat : Kementerian Keuangan.
- Fitri, Riska Lailatul, and Doni Triono. 2020. "Analisis Optimalisasi Eks BMN Idle (Studi Kasus Eks BMN Idle Berupa Tanah Dan Bangunan Rumah Negara Golongan II di Jl. Letjend Suprpto No. 31 Jember) ." *Indonesia Rich Journal* 15-29.
- Hanapi, Hapil. 2019. "Penerapan Sukuk dan Obligasi di Indonesia ." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 35-56.
- Investment, Indonesia. 2024. *Indonesia Investment*. Januari 11. <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253?>
- Karimah, Zulfinar Nur, and Shieny Tan Putri. 2021. "Pengaruh Kepemimpinan Lee Kuan Yew dan FDI terhadap Peningkatan PDB per Kapita Singapura." *Jurnal MEKA* 79-83.
- Mankiw, Gregory N. 2006. *Macroeconomics*. Salemba Empat .
- Mongan, Jehuda Jean S, and Putu Mahardika Adi Saputra. 2012. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Inflasi terhadap Produk Domestik Bruto di Asean 5." *Jurnal FEB Universitas Brawijaya* .

- Putri, Feldha Sasthiana, and Lilis Ardini. 2020. "Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 1-18.
- Rosyidah, Norma. 2015. "Optimalisasi Fungsi Barang Milik Negara (BMN) Melalui Sukuk Sebagai Instrumen Pembiayaan Nasional." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 161-172.
- Sukirno, S. 2006. *Makroekonomi : Teori Pengantar* . Rajagrafindo Persada .
- Todaro, Michael P, and Stephen C Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.